**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)
BANK PASAR KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1994 dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/59/1995 tanggal 6 Maret 1995 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/130/1998 tanggal 13 Mei 1998 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 15 ;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) serta telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 dimaksud sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38421) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) BANK PASAR KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.
7. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.
8. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.
9. Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.

**BAB II
PENDIRIAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terhadap PD. BPR Bank Pasar diberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang berlaku.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PD. BPR yang didirikan ini bernama PD. BPR Bank Pasar.
- (2) PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi Daerah di bidang perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (4) PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang atau unit pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD. BPR Bank Pasar dalam melaksanakan usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

- PD. BPR Bank Pasar dibentuk dan didirikan dengan maksud serta tujuan untuk :
- a. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ;
 - b. menghilangkan kegiatan lintah darat atau lepas uang yang berada di Daerah.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

PD. BPR Bank Pasar mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PD. BPR Bank Pasar mempunyai fungsi :

- a. terhimpunnya dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka ;
- b. terselenggaranya pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan menengah ;
- c. terlaksananya kerjasama antar PD BPR, BPR swasta atau lembaga perbankan atau keuangan lainnya ;
- d. terlaksananya di bidang usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI USAHA-USAHA

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi serta untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, PD. BPR Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usahanya antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, Giro atau jenis lainnya pada bank lain.

BAB VII MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. BPR Bank Pasar yang didirikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 11

- (1) Perubahan modal dasar PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar atau aset PD. BPR bank Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII TIPE DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Tipe susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tipe susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.